

Diterima: [Oktober 21, 2025]

Direvisi: [Februari 13, 2026]

Diterbitkan: [Juli 29, 2026]

Article type: [Research Article] | Subject area: [Political Philosophy & Public Ethics] | Running title: [Gandhi's Thought and Corruption Eradication]

RELEVANSI PEMIKIRAN MAHATMA GANDHI TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Zainal Fadri

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

*Corresponding author: zainalfadri@iainbatusangkar.ac.id

ABSTRACT

The issue of corruption that occurs in various parts of the country is a matter of concern for all people. There are many preventive activities carried out by the government and regulatory agencies, but the results have not shown a positive number for the decline. Many institutions create designs and systems to prevent acts of corruption, but corrupt behavior remains a major problem for countries in the world. even many large countries were destroyed by acts of corruption. This study aims to provide an overview of the prevention or eradication of corruption with other approaches. The approach used is more directed at the personal approach of corrupt behavior. After getting a good understanding of corruption, then a system will be created that will lead every corrupt behavior to self-realization so as not to become corrupt. The data of this study were obtained from literacy collection then compiled and analyzed in order to obtain a picture and conclusion that corruption cases can be resolved by other methods, namely using the method introduced by Mahatma Gandhi, namely the approach to meaning and the approach of the human person.

Keywords: Corruption; Gandhi; Prevention

DOI: <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v9il.3287>

Lisensi: CC BY-SA 4.0

RESEARCH HIGHLIGHTS

[Examines anti-corruption through Mahatma Gandhi's ethical human philosophy.]

I. PENDAHULUAN

Korupsi sudah menjadi isu sehari-hari media massa baik cetak maupun elektronik. Banyak sekali kasus yang mencuat mengatasnamakan korupsi, suap, dan segala macamnya. Masalah korupsi di Indonesia seakan-akan tidak akan pernah berakhir, buktinya belum selesai suatu permasalahan, sudah muncul lagi permasalahan yang lain. Tumpukan-tumpukan masalah seakan-akan tidak bisa diatasi dan sudah menjadi kewajiban untuk setiap negara.

Faktor penyebab korupsi bisa dikatakan suatu hal yang telah mendarah daging sejak masa dulu kala. Penyebab terbesar seseorang melakukan korupsi karena ingin memenuhi kebutuhan di luar kemampuannya, maka cara apapun akan dilakukan demi kebutuhan tersebut, termasuk kecurangan-kecurangan yang bernama korupsi.

Dengan begitu korupsi mungkin hanya bisa diatasi dengan membersihkan pribadi dari perilaku konsumtif dan hidup dalam kesederhanaan. Sesungguhnya kesederhanaan akan mendatangkan suatu kebahagiaan hakiki dibanding dengan tumpukan bergudang-gudang harta yang tidak jelas asal-usulnya. Pada uraian ini akan dilihat korelasi antara korupsi dan pemikiran konsepsi manusia menurut Mohandas Karamchand Gandhi. Dari persoalan yang ada kemudian dilakukan pembahasan, maka penulis memfokuskan pada beberapa bahasan sebagai berikut: 1) Konsepsi manusia menurut pandangan Gandhi, 2) Persoalan korupsi di Indonesia, dan 3) Relevansi pemikiran konsepsi manusia menurut Gandhi terhadap pengentasan korupsi di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis kritis mengenai suatu pemikiran tertentu. Analisis pemikiran yang dilakukan adalah sejauh mana relevansi pemikiran Mahatma Gandhi terhadap kondisi manusia, kemudian diintervensi ke dalam sebuah solusi untuk pencegahan terjadinya korupsi. Dalam arti ketika manusia sudah dapat memahami diri sendiri sebagai hakikat, maka perbuatan korupsi diibaratkan sebagai pelanggaran kodrat.

Data dan sumber pada penelitian ini dikumpulkan melalui distribusi sumber bacaan yang terdapat di perpustakaan. Data yang terkumpul kemudian dilakukan klasifikasi yang disesuaikan dengan bahan dan kajian penelitian kemudian dilakukan sebuah perbandingan data yang akan menghasilkan suatu konsep baru mengenai pemberantasan korupsi.

Tahap penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data, melakukan analisis kemudian membuat sebuah laporan yang nanti akan diberikan triangulasi data, mengenai sumber, metode dan hasil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ajaran Gandhi Tentang Manusia

Manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Tubuh manusia merupakan bagian dari alam semesta sama seperti benda-benda lain. Artinya tubuh manusia mengalami proses perubahan dari keadaan yang rawan dan lemah berkembang menuju pada kesempurnaan sampai akhirnya rapuh dan hancur dalam kematian. Manusia bukan hanya makhluk yang terdiri atas unsur jasmani saja, tetapi juga memiliki roh (Wegig, 1986: 60). Manusia sebagai makhluk dunia mempunyai kelebihan memiliki struktur otak, rasio, kesadaran dan emosi, seharusnya mampu berfikir kritis, mempertanyakan segala hal dan sekaligus mencoba mencari jawabannya. Dengan emosi kita mampu mengenal suasana hati senang, sedih, marah bahkan mungkin bingung (Hamzah, 2003: 46).

Kesempurnaan manusia menurut Gandhi digambarkan sebagai “satyagrahi”, yaitu orang yang mampu mengatasi serta menguasai kekuatan-kekuatan jahat, tidak hanya dalam diri akan tetapi juga dari luar diri (Wegig, 1986: 61). Untuk dapat menjadi satyagrahi kita harus berusaha untuk selalu melakukan pemurnian diri dengan cara melepaskan diri dari nafsu duniawi serta menjauhi segala macam kekerasan termasuk pada musuh sekalipun, hal ini disebut dengan istilah ahimsa. Hidup adalah merealisasikan kebenaran sejati diri sendiri sampai mencapai tahapan yang sempurna.

Tindakan ahimsa bukan hanya berarti tidak membunuh ataupun tidak menyakiti sesama manusia saja, tetapi ahimsa disini diartikan sama dengan sikap tanpa kekerasan (*non violence*) atau dengan kata lain tindakan yang ahimsa serta rasa persaudaraan yang tanpa pamrih (Anandamurti, 1991: 3). Bahkan pada tingkat yang lebih tinggi ahimsa berarti tidak melukai, menyakiti, melakukan kekerasan pada manusia saja, tapi juga pada semua makhluk yang bernyawa termasuk binatang.

Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya dalam seluruh aktivitas kehidupan selalu berlandaskan pada akal pikiran, cipta karsa, rasa, juga pengaruh emosinya. Jadi dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berbudaya dimana kebudayaan itu akan membawa manusia pada tingkat yang paling tinggi kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Maka dari itu manusia adalah makhluk yang sempurna dan juga makhluk yang spiritual (Bakker, 1984: 74). Menurut Koentjaraningrat, unsur-unsur kebudayaan manusia meliputi segala macam aspek kehidupan manusia termasuk aspek politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan adat istiadat (Koentjaraningrat, 1980: 16).

Kesadaran dan Pengendalian Diri

Manusia menurut Gandhi adalah manusia karena kemampuannya untuk mengendalikan dirinya. Manusia adalah manusia karena kemampuannya yang bukan hanya mampu mengambil jarak dengan sesuatu yang berada di luar dirinya, tetapi juga karena mampu mengambil jarak dengan sesuatu yang berada dalam dirinya. Ketidakmampuan dalam mengambil jarak dengan nafsu-nafsunya merupakan halangan untuk menyadari Atman. Dalam hal ini akan mengakibatkan sesuatu akan terlahir kembali (Suratno, 1999: 59).

Manusia perlu mengendalikan dirinya karena peradaban dalam makna kata yang sebenarnya, bukanlah sesuatu yang menghendaki dilipatgandakannya kebutuhan. Melainkan menghendaki pembatasan segala kebutuhan dengan sengaja dan sukarela. Hanya dengan cara demikian akan dapat dibina kebahagiaan dan kepuasan sejati, yang akan meningkatkan kemampuan manusia untuk berbakti pada Tuhan-nya. Hal ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh manusia zaman modern yang menggunakan tolak ukur tingkat kesejahteraan manusia dengan mengukur tingkat besarnya konsumsi. Mereka berasumsi bahwa semakin tinggi tingkat konsumsi dan kebutuhan hidup manusia berarti lebih kaya dan lebih sejahtera (Suratno, 1999: 60).

Gandhi menegaskan bahwa bagi manusia keserasian dan kenyamanan fisik pada tingkat tertentu memang sangat diperlukan, namun jika melampaui batas bukan lagi sebagai penunjang bahkan bisa menjadi hambatan dan penghalang. Maka cita-cita manusia untuk menciptakan suatu kebutuhan hidup yang tidak terbatas dan memenuhinya, hanya merupakan suatu khayalan dan jerat belaka. Pemuasan kebutuhan fisik ataupun kebutuhan intelektual seseorang pada suatu titik harus dihentikan sepenuhnya sebelum ia menjadi nafsu keserakahan fisik dan budaya. Dihentikan agar jangan menjadi suatu hambatan lagi bagi kebaikan untuk manusia (Suratno, 1999: 60).

Dalam hal kesadaran dan pengendalian diri ini Gandhi juga menyatakan:

“... apa yang saya ingin capai selama 30 tahun ini senantiasa saya berusaha dan mengidam-idamkannya adalah kesadaran dan pengendalian diri, karena ingin bermuka-muka dengan Tuhan. Ingin mencapai *mokhsa*”

Bagi Gandhi (1985: 196) kata 30 tahun ini mengacu pada berbagai disiplin yang dipandang sebagai jalan menuju Tuhan, yakni mencari nafsu-nafsu buruk yang tersembunyi di lubuk hatinya untuk kemudian dihilangkan. Pikiran harus dikuasai kemauan karena pikiran yang tiba-tiba muncul merupakan afeksi dari kalbu. Maka pengekangan pikiran berarti juga pengekangan kalbu, dan atman yang berada di dalam diri manusia akan membantu untuk usaha itu.

Kesadaran dan pengendalian diri juga perlu dilakukan manusia dalam kerangka satyagrahi. Hal ini dilakukan karena satyagrahi menuntut disiplin diri yang kuat dan konstan. Disiplin ini tidak hanya pada hal-hal yang besar saja, justru juga pada hal-hal kecil, misal mentaati aturan hidup sehari-hari dan menepati waktu yang telah ditentukan. Disiplin semacam ini akan sangat membantu memelihara pengontrolan diri (Suratno, 1999: 63).

Untuk dapat menguasai diri, Gandhi menganjurkan agar manusia mengenal dirinya sendiri yang berarti berani mengenali dan mengakui keterbatasan-keterbatasan yang ada. Sebab dengan demikian ia memiliki titik tolak ukur yang benar untuk dapat menyempurnakan diri. Kesadaran sedemikianlah yang dapat merealisasikan diri dalam kehidupannya.

Seputar Masalah Korupsi di Indonesia

Dalam ilmu Akuntansi, korupsi merupakan bagian dari kecurangan (fraud) namun secara operasional istilah korupsi lebih terkenal dibandingkan kecurangan. Kecurangan adalah segala cara yang dapat dilakukan orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras,

memanipulasi, kolusi menipu orang lain dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan cara melawan hukum (Suradi, 2006: 1). Korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni pada tahap dimana organisasi masyarakat yang rumit mulai muncul.

Meskipun istilah kecurangan telah dikenal oleh sebagian masyarakat namun artinya tidak terlalu jelas. Sebagai contoh, dalam bangkrutnya suatu perusahaan atau gagalnya suatu bisnis sering dikaitkan dengan adanya kecurangan, padahal semua itu bisa saja disebabkan faktor lain, seperti lemahnya kebijakan dan lainnya. Oleh karena itu perlu diperjelas definisi dari kecurangan itu sendiri. Setelah terjadi masa reformasi istilah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) jauh lebih terkenal dibandingkan dengan istilah kecurangan (fraud) itu sendiri, meskipun KKN termasuk dalam kecurangan. Menurut ACFE secara garis besar terdapat tiga kategori dari skema kecurangan yaitu: 1). Kecurangan oleh manajemen (manajemen fraud), 2). Korupsi (corruption), dan 3). Penggelapan aktiva (Suradi, 2006: 2).

Pada dasarnya situasi yang membuka kesempatan korupsi adalah karena kurang adanya pengawasan dan sanksi yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Beberapa diantaranya dalam Sulistoni (2001: 4-5) adalah:

- a. Kurang memadainya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah sehingga banyak sekali proyek-proyek yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Struktur organisasi yang menciptakan wewenang atau kekuasaan berlebihan dan tidak terkontrol.
- c. Kualitas perundang-undangan yang tidak memadai, sehingga banyak celah-celah yang dimanfaatkan koruptor tanpa perlu khawatir dijerat oleh hukum.
- d. Masyarakat tidak peduli terjadi korupsi atau tidak, padahal yang paling dirugikan adalah masyarakat itu sendiri.

Meskipun banyak terdapat cara untuk melakukan kecurangan, ada tiga faktor penting yang menyebabkan orang melakukan kecurangan yaitu: 1) adanya tekanan (*perceived pressure*), 2) adanya kesempatan (*perceived opportunity*), dan 3) berbagai cara untuk merasionalisasi agar kecurangan dapat diterima, dan ketiga unsur tersebut biasa dikenal dengan *Segitiga Kecurangan* (Suradi, 2006: 8).

Kehidupan dapat menciptakan suatu tekanan situasional yang signifikan, pada suatu saat orang akan diuji tentang etika dan kejujurannya. Maka tekanan-tekanan inilah yang dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Sebagian besar para ahli sepakat bahwa tekanan dibagi ke dalam empat jenis: tekanan keuangan, sifat buruk, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan tekanan yang lain (Suradi, 2006: 11-12).

Tekanan keuangan (*financial pressure*) yang menyebabkan orang berbuat curang bisa disebabkan serakah (*greed*), gaya hidup melebihi kemampuan (*living beyond one's means*), memiliki hutang besar (*high bills or personal debt*), mengalami kerugian finansial (*personal financial losses*), dan kebutuhan uang yang tak terduga (*unexpected financial need*) (Suradi, 2006: 12).

Adanya kesempatan akan menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, menyembunyikannya, atau menghindari hukuman merupakan unsur kedua dari segitiga kecurangan. Paling tidak, terdapat lima faktor yang meningkatkan kesempatan individu untuk berbuat kecurangan dalam suatu organisasi, Suradi (2006: 14) yaitu: 1) kurangnya pengendalian yang dapat mencegah atau mendeteksi perilaku curang, 2) ketidakmampuan menilai kualitas kinerja (*inability to judge quality of performance*), 3) terbatasnya akses terhadap informasi (*lack of access to information*), 4) ketidaktauhuan, apatis dan ketidakmampuan (*ignorance, apathy and incapacity*) serta 5) tidak adanya jejak audit (*lack of an audit trail*).

Unsur yang ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi (rationalization) akan memberi kontribusi terhadap terjadinya kecurangan, karena rasionalisasi akan memberikan pembenaran tentang apa saja yang kita lakukan dengan tujuan untuk memuaskan diri sendiri, meskipun tidak memiliki alasan yang kuat dan pembenaran tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi moral maupun etika. Misalnya seorang yang melakukan korupsi dan uang korupsi tersebut sebagiannya digunakan untuk acara keagamaan serta menyantuni fakir miskin. Hampir setiap kecurangan melibatkan rasionalisasi. Dengan melakukan rasionalisasi akan membantu orang untuk menyembunyikan ketidakjujuran dari tindakannya. Rasionalisasi yang sering dijumpai dalam kecurangan: 'saya hanya meminjam uang, saya akan mengembalikannya' (I'm only borrowing the money, I'll pack it back), 'setiap orang melakukannya' (everyone does it), 'saya tidak menyakiti siapapun' (I'm not hurting anyone), 'perusahaan meminjami kami' (the organization owes it to me), 'tindakan tersebut untuk suatu tujuan yang baik' (it's for a good purpose) (Suradi, 2006: 15).

Korupsi terjadi semenjak pemerintah mengumpulkan dana-dana dari masyarakat (pajak, iuran, retribusi, dan lain-lain) sebagai penerimaan negara hingga pada saat dana-dana tersebut direalisasikan sebagai anggaran pembangunan. Dari sudut jumlah dana yang dikorupsi, korupsi di Indonesia diperkirakan mencapai 30 persen. Bahkan persepsi dari sebagian masyarakat mencapai 50 persen dari seluruh dana-dana yang dikumpulkan dari rakyat (Sulistoni, 2001: 5).

Dari sudut kualitasnya korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik. Artinya korupsi telah dilakukan di semua lembaga negara dari tingkatan paling rendah hingga paling tinggi dan di semua sektor termasuk lembaga hukum yang seharusnya menegakkan hukum, justru menjadi mafia hukum. Korupsi sistemik bersifat terorganisir dan menjadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat, sehingga sulit dihindari bahkan cenderung diterima sebagai kenyataan yang wajar.

Biasanya yang menjadi banyak sorotan adalah begitu banyaknya masyarakat yang terlibat dalam pemberian suap (uang pelicin, uang rokok, tip dsb) untuk mempermudah kepentingannya. Namun itu tidak dapat dikatakan sebagai budaya karena sebagian besar masyarakat tidak menginginkan biaya tambahan di luar biaya resmi. Meskipun dalam situasi demikian masyarakat ikut membantu terjadinya korupsi tetapi sebetulnya masyarakat melakukan penyuapan tersebut karena merasa tidak berdaya untuk menghentikan perbuatan oknum pemerintah di sektor pelayanan publik. Sementara mereka dikejar oleh kebutuhan yang sangat penting seperti KTP, SIM, IMB dan segala macamnya. Karena hal tersebut terus menerus akhirnya menjadikan masyarakat tidak peduli lagi bahkan larut di dalamnya dan menganggap sebagai suatu hal yang biasa dan seolah-olah korupsi tampak sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Salah satu akibat merajalelanya korupsi yang melanda seluruh sistem ialah semakin lemahnya kemauan untuk melawan korupsi. Melemahnya kemauan ini terlihat dalam berbagai bentuk, seperti sikap membiarkan iklim korupsi dan berusaha mengaitkannya dengan norma-norma kelembagaan serta budaya yang hidup di masa-masa sebelumnya (Alatas, 1987: 117-118).

Korupsi Ditinjau Dari Konsepsi Manusia Mahatma Gandhi

Gandhi mengatakan bahwa manusia harus mempunyai kesadaran sehingga dapat mengendalikan diri dari segala nafsu-nafsu dunia yang menjadi rintangan. Termasuk salah satunya adalah adanya godaan untuk melakukan tindakan terlarang yaitu korupsi. Korupsi bisa saja disebabkan oleh pengaruh dari luar diri ataupun dari dalam diri. Faktor luar bisa berbentuk tekanan-tekanan yang diberikan oleh lingkungan termasuk atasan maupun relasi di kantor tempat bekerja.

Korupsi merupakan salah satu akibat dari pada manusia tidak dapat mengendalikan dirinya. Pengendalian diri juga harus diterapkan dalam sikap kesederhanaan untuk mendapatkan suatu kemuliaan. Prinsip yang menjadikan korupsi adalah sikap individu yang terlalu konsumtif dalam kehidupan sehari-hari. Manusia harus memenuhi segala keinginannya. Kebutuhan yang melebihi kemampuan menjadi suatu pemicu yang sangat mendasar atas perilaku korupsi.

Korupsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri yang tak dapat dipenuhi dengan hasil sendiri, harus mencari tambahan agar seluruh kebutuhan tadi terpenuhi. Koruptor tidak akan pernah berpikir dampak yang ia ciptakan terhadap orang-orang (masyarakat) di sekitarnya. Yang terpenting hanyalah memenuhi kebutuhan pribadi dan hidup di dalam kemewahan serta kebahagiaan, padahal Gandhi menyatakan sikap yang demikian hanyalah merupakan khayalan dan penjerat semata.

Bagi Gandhi tujuan hidup bukanlah untuk menumpuk harta dan kesenangan sebanyak mungkin, tetapi hidup dalam kesederhanaan dan mendekatkan diri pada Tuhan sebagai Yang Maha Agung. Disini konsep atman diterapkan. Sesungguhnya tujuan hidup manusia tak lain dan tak bukan adalah ingin mendapat ketenangan dan kedamaian batin tanpa mengganggu satu sama lain, sehingga kedamaian dalam kehidupan tentunya akan terjalin. Terciptanya kedamaian dan kebahagiaan akan membawa manusia pada suatu kehidupan yang lebih bernilai dari pada hanya menumpuk kekayaan semata dan hidup sebagai konsumtivistis.

Tawaran Penanggulan Korupsi di Indonesia

Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai pencegah dari terjadinya kecurangan dan korupsi yaitu menciptakan suatu budaya kejujuran, keterbukaan dan saling membantu. Faktor-faktor tersebut adalah

1. Merekrut pegawai yang jujur dan melatihnya tentang kesadaran dan risiko melakukan kecurangan.
2. Menciptakan suatu lingkungan yang positif.
3. Menyebarkan pemahaman yang baik dan penghormatan terhadap kode etik atau etika.
4. Menyediakan program pelatihan untuk karyawan

Korupsi akan terjadi apabila ada suatu kesempatan sebagaimana diuraikan dalam segitiga kecurangan. Ada beberapa metode untuk mengurangi kesempatan-kesempatan seseorang untuk melakukan korupsi, metode itu antara lain:

1. Menerapkan pengadilan intern yang baik.
2. Mengurangi kolusi.
3. Meningkatkan kepada pemasok dan kontraktor terhadap kebijaksanaan perusahaan.
4. Pemantauan terhadap karyawan.
5. Menciptakan suatu ekspresi terhadap suatu hukuman.
6. Proaktif terhadap audit kecurangan, dan sebagainya.

Dari sekian banyak cara untuk pengentasan masalah korupsi di Indonesia, yang terpenting dan tak boleh dilupakan adalah proses pembersihan diri masing-masing individu. Seperti yang dinyatakan Gandhi, jika masing-masing jiwa sudah bersih maka segalanya akan berlangsung sesuai dengan jalan yang telah ditentukan. Pembersihan diri ini bertujuan agar manusia kembali lagi pada dirinya sebagai atman yang suci.

IV. KESIMPULAN

Menurut Gandhi manusia pada dasarnya adalah *satyagrahi*, yaitu mampu mengendalikan nafsu-nafsu jahat, dan akan membawanya pada suatu penyucian jiwa. Penyucian jiwa hanya dapat dilakukan dengan jalan *ahimsa*. Ahimsa adalah suatu sifat tanpa perlawanan atau kekerasan (*non violence*). Dengan *ahimsa* maka manusia akan menemukan kesucian yang sesungguhnya yaitu menjadi atman sebagai hakikat dari manusia itu sendiri.

Korupsi merupakan suatu tindakan kecurangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang melampaui kemampuan. Korupsi dipicu oleh 3 faktor yaitu adanya tekanan baik dari dalam diri maupun dari luar diri, adanya kesempatan dan adanya rasionalisasi dari kejahatan tersebut. Hal ini dirumuskan dengan sebutan *segitiga kecurangan*.

Konsepsi Gandhi disini berusaha untuk mengembalikan manusia-manusia konsumtif sebagai penyebab utama bagi korupsi agar kembali pada pemahaman hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan akan menyucikan jiwa sebagai atman, karena mengejar materi untuk memenuhi kebutuhan di luar kemampuan hanyalah khayal dan jerat belaka. Sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki bukanlah hidup bergelimang harta, tapi hidup dengan tentram, damai dan senantiasa dekat dengan Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. H. (1987). *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Alkostar, A. (2015). *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Anandamurti, S. S. (1991). *Yama Niyama* (Terj. Ketut Nila). Jakarta: Peraturan Ananda.
- Bakker, Y. W. M. (1984). *Filsafat Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Barnadib, I. (1985). *Filsafat Pendidikan (Pengantar mengenai Sistem dan Metode)*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit FIP IKIP.
- Gandhi, M. K. (1985). *Sebuah Otobiografi* (Terj. Gd. Bagoes Oka). Denpasar: Yayasan Bali Canti Siwa.
- Gutek, G. L. (1997). *Philosophical and Ideological Perspectives on Education*. Chicago: Loyola University.
- Hamzah, S. (2003). *Makna Konflik Sosial Menurut Mohandas Karamchand Gandhi*. Skripsi Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Hirschman, A O. (1970). *Exit, Voice, and Loyalty*. Cambridge, MA: Harvard University Press
- Kartodihardjo, H. dkk. (2016). "Transaction Cost of Forest Utilization Licenses: Institutional Issues."
- Koentjaraningrat. (1980). *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Komalasari., Kokom., & Saripudin, D. (2015). American Journal of Applied Sciences 2015(6): 445-451.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2019). *Catatan Akhir Tahun 2018: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*. Jakarta: KPA.
- Muhtadi, B. (2018). Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins.
- Sulistoni, G., dkk. (2001). *Mencabut Akar Korupsi: Panduan Sederhana*. NTB: SOMASI.
- Suradi. (2006). *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Yogyakarta: Gaya Media.
- Suratno. (1999). *Konsep Manusia Menurut Mohandas Karamchand Gandhi*. Skripsi Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wagig, W. R. (1986). *Dimensi Etis Ajaran Gandhi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wibowo, Agus. (2013). *PAK di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Woshinsky, O. H. (2008). *Explaining Politics: Cultures, Institutions, and Political Behaviour*, New York: Routledge.